



LAPORAN KINERJA TAHUNAN

2021



**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN**

Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan Selatan

Telp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948

Email : kkp.banjarmasinnew@yahoo.co.id / Website : www.kkpbanjarmasin.or.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan Rahmat-NYA atas tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.



Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini merupakan tahap kedua dari periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 – 2024, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2021.

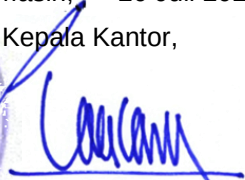
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini selain menjelaskan tentang target dan hasil pencapaian kinerja kegiatan, realisasi anggaran dan rencana tindak lanjut atas permasalahan yang ditemui pada tahun sebelumnya, juga menjelaskan tentang target indikator kinerja kegiatan, rencana kegiatan dan alokasi anggaran kegiatan Tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan fokus dalam upaya pencapaian kinerja secara lebih optimal.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik untuk penyempurnaan rencana kinerja yang lebih baik dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kinerja ini.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2021 dan bahan evaluasi atas target pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 agar lebih relevan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan program kegiatan.



Banjarmasin, 20 Juli 2020
Kepala Kantor,


H. Ruslan Fajar, S.KM.
NIP 196307251987031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penulisan	4
II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	5
A. Capaian Indikator Kinerja TA. 2019	5
B. Alokasi Anggaran TA. 2019	7
C. Realisasi Anggaran TA. 2019	8
D. Rencana Tindak Lanjut TA 2019.....	12
E. Target Indikator Kinerja TA. 2020	12
F. Alokasi Anggaran TA. 2020	13
III. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021	15
A. Target Indikator Kinerja Kegiatan	15
B. Rencana Kegiatan	16
C. Alokasi Anggaran Kegiatan	21
IV. KESIMPULAN.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019	5
Tabel 2	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2019	7
Tabel 3	Perbandingan Antara Realisasi Anggaran dan Capaian Output Kegiatan Tahun. 2019	8
Tabel 4	Perbandingan Antara Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2019	9
Tabel 5	Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020	12
Tabel 6	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2020	13
Tabel 7	Perbandingan Antara Alokasi Anggaran dan Target Output Kegiatan Tahun 2020...	13
Tabel 8	Perbandingan Antara Alokasi Anggaran dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020	14
Tabel 9	Perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dan 2021	15
Tabel 10	Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	16
Tabel 11	Alokasi Anggaran Per Kegiatan, KRO dan RO Tahun 2021	21
Tabel 12	Perbandingan Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu cermin indikator utama keberhasilan pembangunan Indonesia. Hal ini mengingat *Human Development Index (HDI)*, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah diangkat sebagai faktor utama dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa dalam upaya mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Perencanaan dan anggaran Program P2P disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA–KL) yang didalamnya memuat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024.

Tahun anggaran 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Program P2P dalam periode pembangunan kesehatan lima tahunan periode 2020-2024. Pada akhir tahun periode ini semua target indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra harus dapat dicapai.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Program P2P selama tahun 2020, menunjukan bahwa rata-rata target indikator kinerja kegiatan telah dapat dicapai, walaupun dalam kondisi pandemic COVID-19 yang merebak sejak awal tahun 2020, kegiatan tetap dapat terlaksana karena adanya usaha dan kerja keras dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan melakukan penyesuaian beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana, meskipun hampir semua ASN dan Non ASN diterjunkan dalam penanganan pandemic COVID-19. Namun masih terdapat beberapa target indikator yang belum tercapai karena terkait dengan faktor penilaian dari eksternal satker. Kegiatan dengan target yang telah tercapai harus terus dipertahankan. Sedangkan kegiatan dengan target belum tercapai harus dilakukan usaha lebih keras melalui berbagai terobosan maupun kegiatan inovatif atau perubahan dalam sistem penganggaran.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan rencana kegiatan untuk mengatasi segala permasalahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja, maka KKP Kelas II Banjarmasin memandang perlu melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan agar penyusunan rencana kerja anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta upaya-upaya yang dilaksanakan dapat lebih terarah.

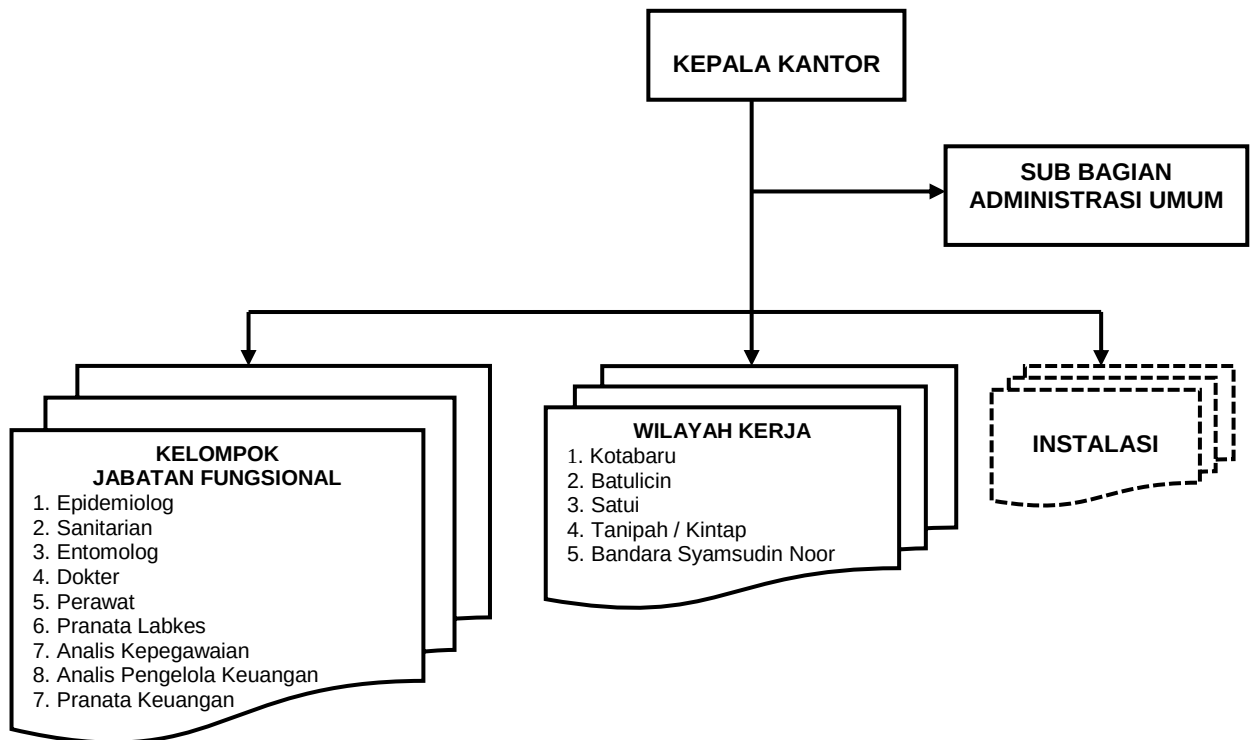
B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan rencana kinerja ini mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
21. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan PANGANGGARAN Bidang Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi International;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/Per/IV/2003 tentang persyaratan rumah makan dan restoran;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman penyehatan sarana bangunan umum;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/ Menkes/Per/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLBD;
37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
38. International Health Regulation 2005.

C. STRUKTUR ORGANISASI



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan 2021 KKP Kelas II Banjarmasin terdiri dari :

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, struktur organisasi KKP Kelas II Banjarmasin dan sistematika penulisan.

4. BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang hasil pencapaian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2019 dan target kinerja Tahun 2020, meliputi capaian indikator kinerja, capaian pelaksanaan anggaran dan rencana tindak lanjut.

5. BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

Bab ini menguraikan tentang target indikator kinerja kegiatan, rencana kegiatan serta rencana dan alokasi anggaran kegiatan tahun 2021.

6. BAB IV KESIMPULAN

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja KKP Tahun 2019 Kelas II Banjarmasin serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA. 2019

Penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin dilaksanakan berpedoman pada rencana aksi kegiatan pada tahun 2015 - 2019. Setiap pelaksanaan kegiatan memiliki target indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya. Pada tahun 2019 indikator kinerja kegiatan mengalami revisi menyesuaikan dengan perubahan indikator rencana program Ditjen P2P. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan	67,220	69,854	104
		a. Sertifikat P3K	2,200	2,410	110
		b. Sertifikat PHQC	62,000	64,553	104
		c. Sertifikat SSCEC	3,000	2,857	95
		d. Sertifikat SSCC	20	34	170
2	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100	150	150
		a. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	4	6	150
		b. Jumlah laporan sinyal yang diterima			
3	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	2,346	2,489	106
		a. Sertifikat COP	2,332	2,475	106
		b. Dokumen Gendec	2	2	100
		c. Surveilans rutin	12	12	100
4	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	8	8	100
		Jumlah pelayanan kesehatan yang di laksanakan pada saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain – lain (Lokasi)	8	8	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Pencapaian
5	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	0	0	0
		Jumlah pelabuhan/bandara udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	0	0	0
6	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	13,940	20,882	150
		a. Sertifikat ijin laik terbang	820	967	118
		b. Sertifikat ijin angkut orang sakit	850	1,220	144
		c. Sertifikat ijin angkut jenazah	270	260	96
		d. Sertifikat ICV	12,000	18,435	154
7	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	8	8	100
		Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM dan TTU memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan	8	8	100
8	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	8	8	100
		Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6	8	8	100
9	Menurunnya penyakit menular langsung	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	800	980	123
		a. Skrining HIV AIDS	300	455	152
		b. Skrining TB Paru	500	525	105
10	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	40	100
		a. RKAKL / DIPA	2	2	100
		b. Laporan Tahunan	1	1	100
		c. Laporan Keuangan	2	2	100
		d. Laporan BMN	2	2	100
		e. Laporan Kinerja	1	1	100
		f. Profil	1	1	100
		g. Proposal PNBP	1	1	100
		h. Dokumen Kepegawaian	2	2	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Pencapaian
		i. E-monev Bappenas (PP 39)	4	4	100
		j. Laporan Eksekutif Bulanan (LEB)	12	12	100
		k. Emonev DJA	12	12	100
11	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah pengadaan sarana prasarana	212	228	108
		a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	40	40	100
		b. Fasilitas Penunjang Perkantoran (Unit)	172	188	109
12	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	2	5	250
		Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP dalam kurun waktu satu tahun (Pelatihan)	2	5	250

B. ALOKASI ANGGARAN TA. 2019

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan baik bersifat teknis maupun administratif dan biaya yang digunakan adalah berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 05 Desember 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15,823,937,000,-. Kemudian terdapat revisi anggaran karena penambahan alokasi anggaran belanja pegawai pada tanggal 12 Nopember 2019 menjadi sebesar Rp. 17,452,628,000,-.

Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan Tahun 2019 berdasarkan sumber pembiayaan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2019

No	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran Awal	Alokasi Anggaran Revisi	Selisih
1	Rupiah Murni (RM)	10,568,813,000	12,197,504,000	1,628,691,000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	5,255,124,000	5,255,124,000	0
	Jumlah	15,823,937,000	17,452,628,000	1,628,691,000

C. REALISASI ANGGARAN TA. 2019

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2019, KKP Kelas II Banjarmasin memperoleh capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3. Perbandingan Antara Realisasi Anggaran dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2019

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A.	Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan							
1	2058.004	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB (Layanan)	297,880,000	284,064,900	95,36	81	81	100
2	2058.007	Layanan Kekarantinaan Kesehatan (Layanan)	2,399,952,000	2,372,165,564	98,84	1828	1943	106
	Sub Jumlah		2,697,832,000	2,656,230,464	98,46			
B.	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik							
1	2059.005	Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	86,270,000	80,955,500	93,84	2	2	100
2	2059.009	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	422,880,000	408,684,102	96,64	421	431	102
	Sub Jumlah		509,150,000	489,639,602	96,17			
C.	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung							
1	2060.500	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS (Layanan)	101,768,000	95,056,200	93,40	4	5	125
2	2060.502	Layanan Pengendalian Penyakit TB (Layanan)	95,000,000	92,039,500	97,94	11	11	100
	Sub Jumlah		196,768,000	187,095,700	95,08			
D.	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya P2P							
1	2063.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	928,572,000	926,544,498	99,78	1	1	100
2	2063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	922,802,000	918,451,172	99,53	1	1	100
2	2063.994	Layanan Perkantoran	12,197,504,000	11,856,950,932	97,21	1	1	100
	Sub Jumlah		14,048,878,000	13,701,946,602	97,53			
	Total		17,452,628,000	17,034,912,368	97,61			

Berdasarkan tabel di atas, antara realisasi anggaran dengan capaian output kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin rata-rata berbanding lurus yaitu realisasi anggaran di atas 95% dan realisasi output seluruhnya 100 % s.d 125 %. Hal ini menunjukkan bahwa dapat dilakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi kegiatan untuk mencapai suatu output kegiatan.

Total realisasi anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 17,034,912,368,- atau 97,61 % dan realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan sebesar 98,46 %. Sedangkan realisasi anggaran terendah dicapai oleh kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung sebesar 95,08 %.

Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja kegiatan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Antara Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan	67,220	69,854	104	449,630,000	449,059,600	99,87
		a. Sertifikat P3K	2,200	2,410	110	62,000,000	61,650,000	99,43
		b. Sertifikat PHQC	62,000	64,553	104	143,990,000	143,780,000	99,85
		c. Sertifikat SSCEC	3,000	2,857	95	240,000,000	239,989,600	99,99
		d. Sertifikat SSCC	20	34	170	3,640,000	3,640,000	100
2	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100	150	150	135,080,000	121,303,200	89,80
		a. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	4	6	150	135,080,000	121,303.200	89,80
		b. Jumlah laporan sinyal yang diterima						
3	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	2,346	2,489	106	1,547,788,000	1,531,987,864	98,98
		a. Sertifikat COP	2,332	2,475	106	165,000,000	162,822,200	98,68
		b. Dokumen Gendec	2	2	100	1,122,000	1,122,000	100
		c. Surveilans rutin	12	12	100	1,381,666,000	1,368,043,664	99,01
4	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	8	8	100	162,800,000	162,761,700	99,98
		Jumlah pelayanan kesehatan yang di laksanakan pada saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain – lain (Lokasi)	8	8	100	162,800,000	162,761,700	99,98

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
5	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	0	0	0	0	0	0
		Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	13,940	20,882	150	186,063,000	179,888,900	96,68
		a. Sertifikat ijin laik terbang	820	967	118	46,563,000	46,563,000	100
		b. Sertifikat ijin angkut orang sakit	850	1,220	144			
		c. Sertifikat ijin angkut jenazah	270	260	96			
		d. Sertifikat ICV	12,000	18,435	154	139,500,000	133,325,900	95,57
7	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	8	8	100	216,471,000	211,229,200	97,58
		Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM dan TTU memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan	8	8	100	216,471,000	211,229,200	97,58
8	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	8	8	100	509,150,000	489,639,602	96,17
		Jumlah pelabuhan / bandara / PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6	8	8	100	509,150,000	489,639,602	96,17
9	Menurunnya penyakit menular langsung	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	800	980	123	196,768,000	187,095,700	95,08
		a. Skrining HIV AIDS	300	455	152	101,768,000	95,056,200	93,40
		b. Skrining TB Paru	500	525	105	95,000,000	92,039,500	96,88

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
10	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	40	100	13,073,046,000	12,730,181,811	97,38
		a. RKAKL / DIPA	2	2	100	13,073,046,000	12,730,181,811	97,38
		b. Laporan Tahunan	1	1	100			
		c. Laporan Keuangan	2	2	100			
		d. Laporan BMN	2	2	100			
		e. Laporan Kinerja	1	1	100			
		f. Profil	1	1	100			
		g. Proposal PNB	1	1	100			
		h. Dokumen Kepegawaian	2	2	100			
		i. E-monev Bappenas (PP 39)	4	4	100			
		j. Laporan Eksekutif Bulanan (LEB)	12	12	100			
		k. Emonev DJA	12	12	100			
11	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah pengadaan sarana prasarana	212	228	108	928,572,000	926,544,498	99,78
		a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	40	40	100	258,050,000	257,999,000	99,98
		b. Fasilitas Penunjang Perkantoran (Unit)	172	188	109	670,522,000	668,545,968	99,71
12	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	2	5	250	47,260,000	46,059,224	97,46
		Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM KKP dalam kurun waktu satu tahun (Pelatihan)	2	5	250	47,260,000	46,059,224	97,46

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran per indikator kinerja kegiatan rata-rata lebih dari 100 % terealisasi. Dari 11 indikator kinerja kegiatan tahun 2019, terdapat 4 indikator kinerja kegiatan dengan capaian sebesar 100 % sedangkan 7 indikator kinerja kegiatan lainnya dengan capaian antara 104 % - 250 %. Untuk realisasi anggaran rata-rata per indikator > 95 % dan realisasi anggaran yang tertinggi yaitu pada indikator kinerja kegiatan Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebesar 99,98 %. Sedangkan realisasi anggaran terendah pada indikator jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung sebesar 95,08 %. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya sinergitas dari semua pengelola program dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran menjadi lebih optimal.

D. RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN TA. 2019

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dari bulan Januari – Desember 2019 terlihat bahwa pencapaian masing-masing indikator secara umum rata-rata tercapai > 100%.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja agar berkesinambungan hingga tahun-tahun berikutnya, maka diperlukan rencana tindak lanjut untuk kegiatan yang belum tercapai atau yang memerlukan upaya optimalisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan advokasi dengan lintas sector dan lintas program terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi dari pengelola program kantor induk ke pengelola program di wilayah kerja pelaksanaan program kegiatan.
3. Peningkatan optimalisasi kegiatan untuk meningkatkan capaian output kegiatan.
4. *Transfer of knowledge* dan inovasi program-program kegiatan oleh pengelola kegiatan yang telah dilatih sehingga dapat meningkatkan system pelayanan dan adanya diferensiasi program kegiatan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
5. Penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana kegiatan secara merata pada seluruh wilayah kerja sesuai kapasitas dan kebutuhan pelaksanaan program di masing-masing wilayah kerja.
6. Komitmen bersama dari pejabat hingga pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan RPK dan RPD yang telah disusun dan disepakati bersama.

E. TARGET INDIKATOR KINERJA TA. 2020

Sedangkan untuk Tahun 2020, penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin dilaksanakan berpedoman pada rencana aksi kegiatan pada tahun 2020 - 2024 menyesuaikan indikator rencana program Ditjen P2P. Adapun indikator kinerja kegiatan Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 5. Target Indikator Kinerja Kegiatan
Tahun 2020**

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2020
1	Terselenggaranya pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1,001,644
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90 %
2	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu masuk Negara	3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	80 %
3	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4	Nilai kinerja anggaran	80
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70
		7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45 %

F. ALOKASI ANGGARAN TA. 2020

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan baik bersifat teknis maupun administratif dan biaya yang digunakan adalah berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16,348,746,000,-. Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan Tahun 2020 berdasarkan sumber pembiayaan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2020

No	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran TA 2020
1	Rupiah Murni (RM)	12.883.176.000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3.465.570.000
	Jumlah	16.348.746.000

Alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan perbandingan dengan target output kegiatan, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Perbandingan Antara Alokasi Anggaran dan Target Output Kegiatan Tahun 2020

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output		Alokasi Anggaran	Target Output
A.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program P2P			
1	2063.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,085,552,000	1
2	2063.994	Layanan Perkantoran	12,284,444,000	1
	Sub Jumlah		13,369,996,000	
B.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk dan Wilayah			
1	4249.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit dikendalikan di Pintu Masuk	2,978,750,000	2,808
	Sub Jumlah		2,978,750,000	
	Total		16,348,746,000	

Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan per indikator kinerja kegiatan kegiatan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Perbandingan Antara Alokasi Anggaran dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,001,644	2,811,599,000
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	131,391,000
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	80%	35,760,000
2	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4. Nilai kinerja anggaran	80	12,768,806,000
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	71,280,000
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	382,270,000
		7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	147,640,000

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

A. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2021 disusun mengikuti kebijakan redesign sistem penganggaran Kementerian / Lembaga merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, serta bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Hal ini merupakan kunci atas ketertiban, kedisiplinan sistem penganggaran. Rencana Kinerja Tahunan merupakan upaya dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun dan menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan 4 tahun mendatang selama periode jangka menengah. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun untuk melaksanakan kegiatan sesuai sasaran dan target indikator sasaran Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2020 terjadi pandemic COVID-19 sehingga mengakibatkan adanya perubahan dan perbedaan antara sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan tahun 2020 dan 2021, seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 9. Perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan
Tahun 2020 dan 2021**

No	Uraian	Semula (2020)	Menjadi (2021)	Keterangan
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Penguatan Peran dan Fungsi KKP di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
		Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Kebijakan relaksasi IKPA Tahun 2020, sehingga indikator dilakukan perubahan

Adanya perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan tersebut di atas mengakibatkan perubahan pada target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2021
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1,808,639
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara	90%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	83
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	72
		7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

B. RENCANA KEGIATAN

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus dibarengi dengan penyusunan rencana kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan. Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024. Namun, tahun 2021 terdapat kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, sehingga rencana kegiatan Tahun 2021 bersifat sebagai tahap lanjutan pelaksanaan perubahan sistem yang akan mempengaruhi rencana kegiatan pada masa 3 tahun kedepan. Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan KKP Kelas II Banjarmasin pada tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. *Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan*

- Pemeriksaan dan penapisan orang
- Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina
- Pemeriksaan barang
- Pemeriksaan lingkungan

2. *Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan*

- Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang
- Faktor Risiko yang dikendalikan pada barang
- Faktor Risiko yang dikendalikan pada alat angkut
- Faktor Risiko yang dikendalikan pada lingkungan

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

- e. Kelengkapan data surveilans
- f. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam
- g. Penyusunan rencana kontigensi
- h. Indeks pinjal ≤ 1
- i. HI perimeter = 0
- j. Tidak ditemukan larva anopheles
- k. Kepadatan kecoa rendah
- l. Kepadatan lalat < 2
- m. TTU memenuhi syarat
- n. TPM laik hygiene
- o. Tempat Penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan

4. Nilai kinerja anggaran

Menggunakan aplikasi E-Monev DJA

5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Menggunakan kriteria penilaian nilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satker melalui aplikasi OMSPAN

6. Kinerja implementasi WBK Satker

Hasil penilaian Tim Hukormas Ditjen P2P dan Tim Penilai Internal Kemenkes RI

Sedangkan berdasarkan redesain sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan berdasarkan Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) dan Rincian Output (RO) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
 - a. Pelayanan Publik kepada Masyarakat
 - 1) Pelayanan Kesehatan Haji
 - a) Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi (Rapat Koordinasi Persiapan)
 - b) Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi (Pemantapan Higiene Sanitasi pangan Penjamah Makanan Catering Haji)
 - c) Pelayanan Kesehatan Embarkasi
 - d) Pelayanan Kesehatan Debarkasi
 - e) Pelayanan Kesehatan Debarkasi (Rapat Evaluasi Pelaksanaan Debarkasi)
 - 2) Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/bandara/Lintas Batas
 - a) Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus
 - b) Pelayanan Vaksinasi
 - c) Verifikasi Terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang Mengajukan Persetujuan Penerbitan ICV

- d) Pengawasan Terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang Melaksanakan Penerbitan ICV
- e) Pertemuan Evaluasi LS, LP dan Klinik/RS Penerbitan Dokumen ICV di Wilayah KKP Banjarmasin

b. Pelayanan Publik Lainnya

- 1) Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
- 2) Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus
- 3) Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan
- 4) Layanan Pengendalian Vektor DBD
- 5) Layanan Survei Vektor Pes
- 6) Layanan Pengendalian Vektor Diare
- 7) Layanan Survei Vektor DBD
- 8) Layanan Survey Vektor Malaria
- 9) Layanan Survey Vektor Diare
- 10) Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS
- 11) Layanan Deteksi Dini Terduga TBC
- 12) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
 - a) Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan Pra Embarkasi
 - b) Pemeriksaan dan Pengendalian Sanitasi Lingkungan Asrama Haji
 - c) Survey dan Pengendalian Vektor dan BPP di Asrama Haji
 - d) Pengawasan / Pemeriksaan Kualitas Air di Pelabuhan dan Bandara
 - e) Pemeriksaan Kualitas Makanan di Pelabuhan dan Bandara
 - f) Pemeriksaan Kualitas Tempat-Tempat Umum di Pelabuhan dan Bandara
 - g) Pemeriksaan Kualitas Udara dan Kebisingan di Pelabuhan dan Bandara
 - h) Pengawasan dan Pengendalian Limbah B3 di Pelabuhan
 - i) Uji Resistensi Insektisida
 - j) Pengelolaan Limbah Medis
- 13) Layanan Pemeriksaan Orang, Barang dan Alat Angkut
 - a) Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan dan Bandara
 - b) Pemeriksaan Alat Angkut, Orang, dan Barang pada Situasi KLB/Wabah KKM

c. Sarana Bidang Kesehatan

- 1) Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk
 - a) Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP
 - b) Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan
 - c) Pengadaan Bahan Alat Bahan Medis dan non Medis Untuk Pelayanan

- d. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal
 - 1) Pelatihan Kesehatan
 - a) Peningkatan Kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog
 - b) Peningkatan Kualitas SDM Kualifikasi Karantina Kesehatan dan Sirveilans Epidemiologi
 - c) Peningkatan Kualitas SDM Kualifikasi Tenaga Medis dan Paramedis
 - d) *Refreshing* Tim TGC dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Berpotensi KKM
- 2. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Layanan Perkantoran
 - 1) Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Satker
 - a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b) Pembayaran Tunjangan Kinerja
 - 2) Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan
 - a) Pelaksanaan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
 - b) Langganan Daya dan Jasa
 - c) Pemeliharaan Perkantoran
 - d) Pelaksanaan Operasional Perkantoran
 - b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 - 1) Rencana Program Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Dukungan Manajemen
 - a) Penyusunan E-Renggar
 - b) Penyusunan Renja KL
 - (1) Penyusunan RKA KL
 - (2) Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran
 - 2) Koordinasi Perencanaan Program
 - c. Layanan Umum dan Perlengkapan
 - 1) Pelayanan Umum dan Perlengkapan
 - a) Pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif
 - b) Pengelolaan Kantor BERHIAS
 - c) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
 - d) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- d. Layanan Sarana Internal
 - 1) Sarana Internal
 - a) Pengadaan Peralatan *Health Security*
 - b) Pengadaan Perangkat Pengolah Data
 - c) Pengadaan Peralatan Perkantoran
- e. Layanan SDM
 - 1) Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P
 - a) Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai
 - b) Layanan Mutasi Kepegawaian
 - c) Peningkatan Kompetensi Pegawai
- f. Layanan Hukum
 - 1) Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P
 - a) Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
 - b) Inventarisir Dumas dan Pengelolaan UPG
 - c) Penguatan Pelaksanaan Fungsi PPNS
- g. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - 1) Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a) Penyusunan dan Reviu ABK, Peta dan Informasi Jabatan
 - b) Penyusunan / Monev SOP AP UPT
 - c) Pembangunan Zona Integritas Menuju Satker WBK, Penguatan dan Pendampingan Assessment Penilaian Satker WBK/WBBM
 - d) Reviu Data Klasifikasi UPT
- h. Layanan Kehumasan dan Protokoler
 - 1) Pelayanan Humas dan Protokoler
 - a) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
 - b) Desiminasi / Promosi Informasi Kegiatan Melalui Media Cetak
 - c) Implementasi Budaya Pelayanan Prima
- i. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
 - 1) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program
 - a) Penyusunan laporan Pelaksanaan Program
 - b) Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran
 - c) Penyusunan Laporan Tahunan Satker

- d) Penyusunan Laporan Indikator RAK
 - e) Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja
 - f) Evaluasi SAKIP
- j. Pengelolaan Keuangan Negara
- 1) Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P
 - a) Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan
 - b) Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahun 2020 dan Semester 1 TA. 2021
 - c) Rekonsiliasi Pengelolaan PNBPN
 - d) Konsultasi Permasalahan Pengelolaan / Pelaporan ke Pusat
 - e) Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
 - f) Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN

C. ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan jumlah tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Anggaran yang direncanakan baik bersifat teknis maupun administratif yang berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2021 telah mengikuti kebijakan redesign sistem penganggaran Kementerian / Lembaga yang merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, serta bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Alokasi anggaran pada awal tahun sebesar **Rp. 15,510,075,000,-** yang tersebar dalam 2 (dua) kegiatan utama yaitu Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Anggaran mengikuti redesign belanja yang terdiri atas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) yang telah ditetapkan. Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 11. Alokasi Anggaran Per Kegiatan, KRO dan RO
Tahun 2021**

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output		Alokasi Anggaran
A.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
1	4249.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	738,415,000
	4249.QAA.011	Pelayanan Kesehatan Haji	550,520,000
	4249.QAA.012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	187,895,000

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output		Alokasi Anggaran
2	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	920,136,000
	4249.QAH.002	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	120,000,000
	4249.QAH.004	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	130,950,000
	4249.QAH.006	Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan	13,425,000
	4249.QAH.007	Layanan Pengendalian Vektor DBD	40,318,000
	4249.QAH.008	Layanan Survey Vektor Pes	167,245,000
	4249.QAH.009	Layanan Pengendalian Vektor Diare	9,093,000
	4249.QAH.011	Layanan Survey Vektor DBD	28,800,000
	4249.QAH.012	Layanan Survey Vektor Malaria	20,076,000
	4249.QAH.013	Layanan Survey Vektor Diare	8,960,000
	4249.QAH.014	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	15,125,000
	4249.QAH.015	Layanan Deteksi Dini Terduga TBC	45,550,000
	4249.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	182,994,000
	4249.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	137,600,000
3	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	191,100,000
	4249.RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	191,100,000
4	4249.TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	100,690,000
	4249.TAM.001	Pelatihan Kesehatan	100,890,000
	Sub Jumlah		1,950,341,0000
B.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
1	4815.EAA	Layanan Perkantoran	12,559,734,000
	4815.EAA.001	Gaji dan Tunjangan	9,704,051,000
	4815.EAA.004	Operasional dan Pemeliharaan	2,832,160,000
2	4815.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	90,240,000
	4815.EAB.001	Rencana Program Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Dukungan Manajemen	90,240,000
3	4815.EAC	Layanan Umum	56,260,000
	4815.EAC.001	Layanan Umum dan Perlengkapan	56,260,000
4	4815.EAD	Layanan Sarana Internal	389,551,000
	4815.EAD.001	Sarana Internal	389,551,000
5	4815.EAF	Layanan SDM	123,220,000
	4815.EAF.551	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	123,220,000
6	4815.EAG	Layanan Hukum	10,040,000
	4815.EAG.551	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	10,040,000
7	4815.EAH	Layanan Organisasi dan tata Kelola Internal	10,190,000
	4815.EAH.051	Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10,190,000
8	4815.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	23,520,000
	4815.EAI.551	Pelayanan Humas dan Protokol	23,520,000
9	4815.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	203,340,000
	4815.FAE.551	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program	203,340,000
10	4815.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	117,162,000
	4815.FAH.051	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	117,162,000
	Sub Jumlah		13,559,734,000
	Total		15,510,075,000

Dari Tabel di atas, apabila dibandingkan dengan anggaran Tahun 2020, terdapat perbedaan nomenklatur output dari tahun sebelumnya karena adanya kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran Tahun 2021.

Secara umum yang terlihat jelas terdapat perubahan nomenklatur suboutput kegiatan dan kegiatan terlihat lebih jelas menggambarkan kegiatan yang akan dicapai. Apabila dibandingkan sasaran strategis dan target indikator kinerja kegiatan dengan distribusi alokasi anggaran dapat digambarkan berdasarkan alokasi kegiatan yang sesuai dengan kinerja yang akan dicapai seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Perbandingan Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2021

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2021	KEGIATAN YANG MENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1,808,639	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk dan Wilayah	1,950,341,000
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%		
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara	90%		
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	83	Dukungan Manajemen Pelaksanaan program Di Ditjen P2P	13,559,734,000
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93		
		6	Kinerja implementasi WBK satker	72		
		7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%		

BAB IV

KESIMPULAN

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin mempunyai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2019, dari 11 indikator kinerja kegiatan, 4 indikator kinerja kegiatan dapat mencapai 100 %, 7 indikator kinerja kegiatan mencapai > 100 %, dengan total realisasi anggaran sebesar 97,61 %. Pada Tahun 2020, terdapat perubahan jumlah indikator kinerja kegiatan menjadi 7 indikator sesuai dokumen Rencana Aksi Kegiatan untuk periode 2020 – 2024.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020, merupakan tahap awal rencana aksi kegiatan selama 5 tahun untuk periode 2020-2024 dan telah mengalami penyesuaian untuk mendorong percepatan pencapaian indikator kinerja program. Dengan tersusun Rencana Kinerja Tahun 2020 diharapkan akan menjadi pondasi pelaksanaan kegiatan hingga 5 tahun mendatang. Selain itu, diharapkan pencapaian kinerja pada Tahun 2020 dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan karena telah mengalami penyederhanaan nomenklatur, penyelarasan kegiatan dan output kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi utama Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Sedangkan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021, merupakan tahap lanjutan dari tahun 2020 dalam upaya mencapai target indikator kinerja kegiatan hingga akhir tahun 2024 tahun sesuai Rencana Aksi Kegiatan periode 2020-2024. Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, mengakibatkan adanya penyesuaian mengalami penyesuaian untuk mendorong percepatan pencapaian indikator kinerja program yang sesuai dengan kondisi kebiasaan baru terhadap kondisi pandemi COVID-19. Tersusunnya Rencana Kinerja Tahun 2021 diharapkan akan menjadi dasar kelanjutan pelaksanaan kegiatan hingga 4 tahun mendatang. Selain itu, diharapkan pencapaian kinerja pada Tahun 2021 dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan karena telah mengalami perubahan seiring dengan kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, serta bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih relevan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan pelabuhan dengan penyelarasan kegiatan hingga level Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dalam upaya mewujudkan visi dan misi Presiden.

Untuk dapat mencapai target kinerja kegiatan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin pada Tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, didukung dengan kinerja yang lebih baik, optimal dan profesional, serta penguatan kepatuhan internal dalam pengawasan dan evaluasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Hal ini tentunya perlu didukung dengan peningkatan kompetensi kualitas SDM agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, peningkatan jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.